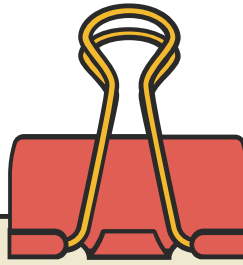
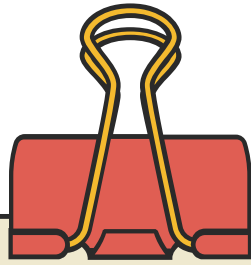




LAYANAN LITERASI HUKUM

**“Modul Pelatihan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum”**

Badan Pembinaan Hukum Nasional – Kementerian Hukum



OVERVIEW

1. Layanan Literasi Hukum

**2. Bentuk Pelaksanaan
Layanan Literasi Hukum**

- **Pembuatan Konten
Literasi Hukum**
- **Sharing Knowledge**



Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Permenkum No.2 Tahun 2024

Pasal 17 huruf b

Salah satu penyelenggaraan Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum: pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, **literasi hukum**, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;

LAYANAN LITERASI HUKUM DI WILAYAH



Pendayagunaan Dokumen & Informasi Hukum

JDIHN

Literasi Hukum

peningkatan kualitas budaya hukum

PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

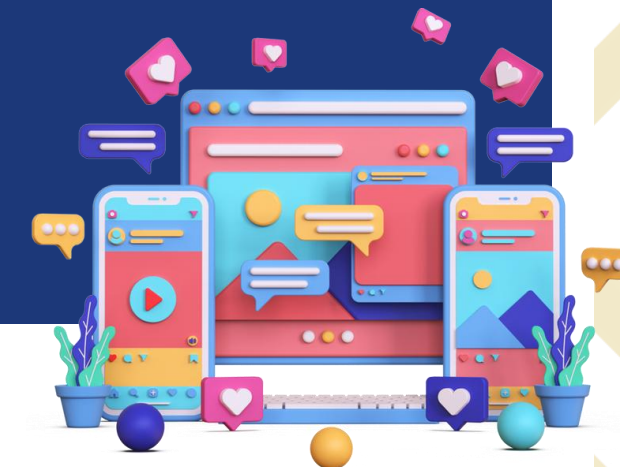
Bentuk Kegiatan Layanan Literasi Hukum

- **Pembuatan Konten Literasi Hukum**
menyediakan akses informasi hukum yang bersifat edukatif, komunikatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat
- **Sharing Knowledge**
dilakukan melalui pertukaran informasi, pengalaman, dan wawasan hukum secara interaktif antara narasumber (seperti penyuluh hukum, akademisi, praktisi hukum, atau aparatur negara) dengan masyarakat atau kelompok sasaran tertentu



Aspek dalam pembuatan konten literasi hukum

Sasaran/Segmentasi Penerima Layanan	Jenis Konten	Kanal Distribusi
• Pelajar/Mahasiswa • Masyarakat umum • Aparatur pemerintah desa • Pelaku usaha • Ibu rumah tangga • Penyandang disabilitas • Komunitas tertentu lainnya.	a) Konten (Informasi) Edukasi Hukum b) Konten Interaktif Hukum c) Konten Promosi	a) Media sosial b) Website resmi Kanwil c) YouTube d) Radio dan media lokal e) Media promosi cetak





Contoh Ragam Konten Literasi

Konten Promosi

HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Buku yang terbit pada tahun 2022 ini membahas secara mendalam tentang hak atas kekayaan intelektual (intellectual property rights). Di mana buku ini membahas HaKI ini secara umum, sistem dan keberadaan HaKI dalam kerangka Hukum Indonesia serta Hukum Internasional, Neighboring Rights, Masalah Konvensi Internasional tentang Hak Cipta, Paten, Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, Sirkuit Terpadu dan tentang Franchise serta perlindungan HaKI melalui internet.

PENULIS
ARIS PRIO AGUS SANTOSO, TRI WISUDAWATI, DAN ECCLISIA SULISTYOWATI

Arif Prio Agus Santoso, SH, MH
Tri Wisudawati, ST, M.Si
Ecclisia Sulistyowati, SE, JAM

JDIHN INDONESIA

AYO KUJUNGI PERPUSTAKAAN BPHN

Temukan berbagai sumber terpercaya untuk kebutuhan riset hukum, informasi hukum terkini, serta koleksi buku-buku hukum yang lengkap dan bermanfaat.

JAM PELAYANAN

SENIN - KAMIS 08.00 - 15.30 WIB
Istirahat: 12.00 - 13.00 WIB

JUMAT 08.00 - 16.00 WIB
Istirahat: 11.30 - 13.00 WIB

Jl. Mayjen Sutoyo No.10, RT.4/RW.14, Cililitan, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13640

JDIHN INDONESIA

Cara Mengakses Produk Hukum Desa

Online:

- Cek website JDIHN (jdihn.go.id)
- Cek website jdih kabupaten/kota masing-masing provinsi

JDIHN INDONESIA

Manfaat JDIH bagi masyarakat :

- Kemudahan akses regulasi desa secara terbuka dan gratis**
- Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa**
- Menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat**

JDIHN INDONESIA

Ayo Jadi Warga Desa Melek Hukum!

Gunakan hakmu untuk tahu aturan desa! Akses dokumen hukum desa sekarang juga!

JDIHN

JDIH hadir untuk desa yang lebih transparan dan partisipatif!

JDIHN INDONESIA

Apakah Undang-Undang Dasar dapat Diubah?

Pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia memuat ketentuan mengenai mekanisme perubahan konstitusi. Aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa perubahan UUD dilakukan secara hati-hati, konstitusional, dan melalui prosedur yang jelas, demi menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan

Prosedur

- Usulan perubahan UUD harus diajukan oleh minimal 1/3 anggota MPR.
- Usulan diajukan tertulis, mencantumkan pasal yang diubah dan alasannya.
- Sidang perubahan UUD harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR.
- Keputusan perubahan disetujui minimal 50% + 1 dari seluruh anggota MPR.
- Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diubah.

JDIHN INDONESIA

Sekata 8 - Desa/Kelurahan Bersih Narkoba

BPHN Kemenkum

2:35:16

BPHN.GO.ID

Konten Interaktif dan Edukasi



Sharing Knowledge

Sharing knowledge atau berbagi pengetahuan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan layanan literasi hukum yang dilakukan melalui pertukaran informasi, pengalaman, dan wawasan hukum secara interaktif antara narasumber (seperti penyuluh hukum, akademisi, praktisi hukum, atau aparatur negara) dengan masyarakat atau kelompok sasaran tertentu.

**Diskusi Kelompok Terfokus
(Focus Group Discussion/FGD)**

**Forum Komunitas atau Kelas
Hukum**

**Pelatihan Partisipatif
(Participatory Legal Education)**

Dialog Interaktif (Online/Offline)

**Sharing Session antar Aparatur
atau Institusi**

**TERIMA
KASIH**